



## Lembar Fakta

### KRITIK TERHADAP UN FOOD SYSTEM SUMMIT 2021

#### Apa itu UN Food Systems Summit?

Pada 19 Desember 2019 lalu, Sekretaris Jendral PBB memberitakan bahwa ia akan mengadakan Food System Summit pada 2021 dalam rangka mentransformasikan sistem pangan untuk merealisasikan 17 SDGs, tepatnya sistem pangan yang “... lebih sehat, berkelanjutan, dan berkeadilan”. Konsepnya adalah melibatkan banyak stakeholder dalam sistem pangan: produsen pangan skala kecil, masyarakat adat, NGO, tetapi juga asosiasi agribisnis. Akan ada tiga tingkatan dialog: Dialog Independen (skala lokal); Dialog Nasional/Negara Anggota (skala nasional); dan Dialog Global Summit (skala global). Indonesia baru saja menyelenggarakan dialog nasional pada 27 April 2021 silam.



Gambar 1. Action Track UN FSS yang akan dijadikan pengumpulan “aspirasi”

panutan mereka dalam mendukung SDGs, dan (3) Sistem untuk meninjau dan memeriksa bagaimana keluaran Summit terus menciptakan keberlanjutan dan tindakan-tindakan baru.

Meskipun tampak meyakinkan, UN Food System Summit telah menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran bagi jejaring produsen pangan skala kecil, masyarakat adat, gerakan sosial, organisasi akar rumput, dan organisasi masyarakat sipil secara global. Perlawan salah satunya ditunjukkan lewat wadah Civil Society and Indigenous People Mechanism (CSM).

#### Permasalahan dalam UN Food System Summit

**Pertama, mengadopsi pendekatan multi-stakeholder dalam penjaringan aspirasi mengabaikan asimetri kekuasaan dan konflik kepentingan.**

Dalam dialog-dialog yang diselenggarakan, UN FSS menaruh kedudukan yang sama bagi aktor privat, pemerintah, korporasi, ilmuwan/ahli, dan NGO internasional yang di-back up kepentingan bisnis bersama dengan petani, nelayan, gerakan sosial, dan masyarakat sipil, sehingga menyediakan forum

Penyelenggaraan Food Systems Summit dengan proses dan struktur seperti ini adalah sesuatu yang baru. Kini arsitekturnya kompleks: terdapat The Special Envoy, the Advisory Committee, the Scientific Group, Five Action Tracks, Food Systems Dialogues, dll. Sebelumnya, negara anggota PBB sebenarnya telah membentuk lembaga dan badan antar-negara (*intergovernmental*) yang menjamin koherensi dan kontinuitas kebijakan dan program di tingkat internasional ke nasional dan telah memiliki mekanisme pelibatan aktor yang tidak pukul rata, salah satunya lewat Committee of World Food Security (CFS) dan Lembaga Berbasis-Roma (FAO, IFAD, dan WFP). Sayangnya lembaga ini malah tidak dipakai untuk menyelenggarakan Summit.

Hasil dari Summit ini kelak akan berdampak pada dinamika di nasional, karena Summit ini akan menciptakan keluaran berupa: (1) Tindakan dan Kemajuan yang terukut menuju Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan yang turut menyerukan Pemerintah Nasional & Lokal untuk bertindak membenahi sistem pangan mereka, (2) Prinsip dan Panduan bagi pemerintah serta pemangku kepentingan lain untuk mengoptimalkan sistem



pengambilan keputusan yang dapat dikooptasi oleh aktor-aktor privat dan korporasi. Sehingga, solusi dan keluaran yang dihasilkan akan berorientasi pasar (*market-based*) dan kepentingan bisnis (*business-led*) pula.

Kedua, undangan partisipasi tidak dilandasi oleh seleksi dan kategori yang jelas, sehingga mem marginalisasi sebagian besar aktor kunci dalam sistem pangan.

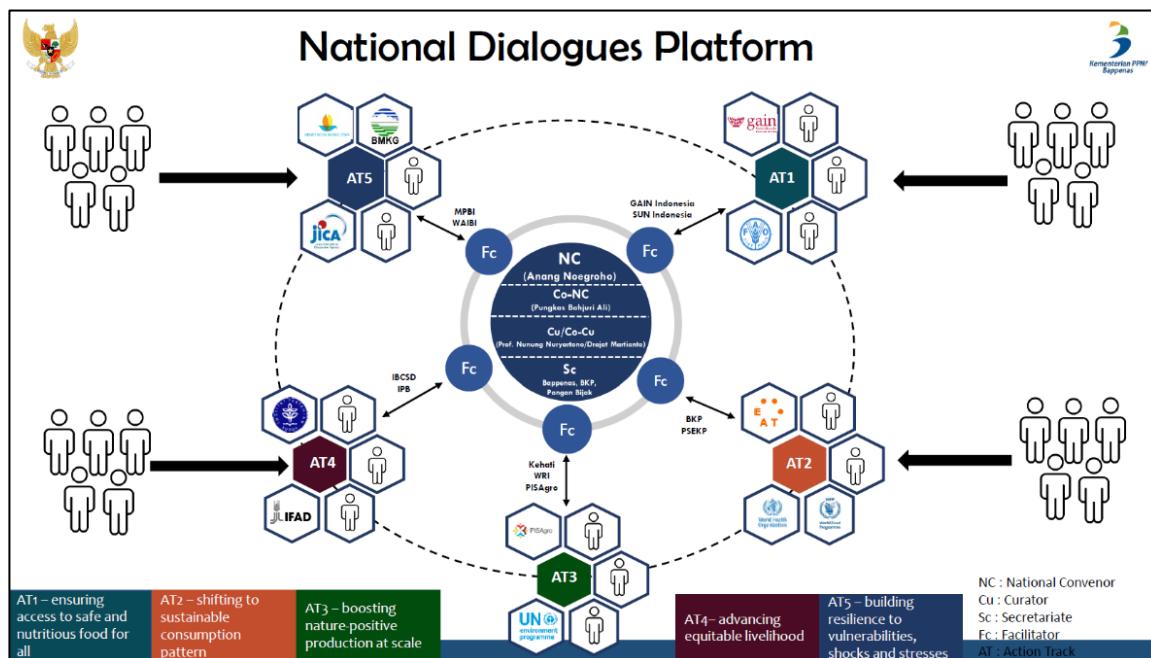
Terdapat kecenderungan bahwa aktor kunci dalam sistem pangan seperti petani, nelayan, perempuan, masyarakat pedesaan, pekerja dan buruh pangan, konsumen, dan mereka yang terdampak perampasan lahan serta kerawanan pangan malah tidak dilibatkan dalam proses & dialog.

Hal ini berimplikasi pada: UN FSS mengakomodasi agenda korporat dalam mentransformasi sistem pangan sehingga gagal untuk mengentaskan permasalahan sistem pangan struktural hingga ke akar dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Mereka juga luput memperhitungkan kedaulatan pangan, agroekologi, dan peran produsen pangan skala kecil dalam makna yang sebenar-benarnya.

Sistem pangan harus dilihat secara holistik dan sistemik. Permasalahan dalam sistem pangan merupakan permasalahan struktural, sehingga membedah permasalahan dan merumuskan solusinya pun harus menggunakan kerangka pikir yang berdasar pada ekonomi politik, asimetri kekuasaan, dan berpendekatan hak asasi manusia (sistem pangan seperti apa yang memenuhi: hak atas tanah, hak atas pangan, hak atas kesehatan, dst). Namun, dengan metode pelibatan multi-stakeholder yang mengakomodasi korporasi, the Summit memperhitungkan sektor privat sebagai aktor yang penting untuk merumuskan solusi atas permasalahan dalam sistem pangan.

## Kritik Terhadap Dialog Nasional di Indonesia

Dialog Nasional di Indonesia telah dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) sebagai penyelenggara pada 27 April 2021 silam. Strukturnya digambarkan seperti ini:



Selain pemetaan aktor yang terindikasi mengundang asosiasi bisnis dan terafiliasi dengan kepentingan bisnis (lihat **Lampiran 1**), hasil Dialog Nasional juga mengamini apa yang dikhawatirkan oleh CSM terhadap penyelenggaraan Food System Summit secara keseluruhan. Pertama, Selain dasar



undangan dan partisipasi yang tidak jelas dan tidak dikemukakan secara transparan ke publik. Kedua, keikutsertaan asosiasi yang anggota-anggotanya adalah perusahaan, termasuk agribisnis (lihat **Lampiran 1**). Ketiga, solusi-solusi yang dihasilkan masih berusaha mengentaskan kelaparan dan permasalahan gizi yang memberi kemudi transformasi sistem pangan di tangan korporasi, yakni dengan solusi seperti biofortifikasi<sup>1</sup>, fortifikasi<sup>2</sup>, korporasi petani, ekonomi sirkuler, *climate smart agriculture*, dan solusi yang tak jauh-jauh dari teknologi, finansialisasi, serta efisiensi. Dengan solusi ini, konsumen dan petani selamanya akan tidak berdaulat. Tak ada agenda yang mendorong reforma agraria, pendisiplinan perusahaan agribisnis pelanggar hak asasi manusia lewat regulasi dan kebijakan, atau penyediaan skema-skema di mana masyarakat bisa berpartisipasi secara penuh dan demokratis dalam menentukan sistem pangan mereka.

### Apa yang Harus Kita Lakukan?

Kita sudah cukup muak dengan permasalahan pangan dan pertanian di tingkat nasional dan kita tidak perlu lagi legitimasi, apalagi dorongan dari tingkat internasional, untuk mengukuhkan sistem pangan yang dikendarai korporasi, berorientasi pasar, dan mengorbankan hajat hidup orang banyak demi melayani logika-logika neoliberal.

Krisis pandemi Covid-19 telah menunjukkan betapa rentannya sistem pangan kita dan betapa saratnya sistem pangan ini dengan ketidaksetaraan, diskriminasi, dan eksplorasi struktural. Mirisnya, korporasi sebagai pelanggar hak asasi manusia paling mumpuni, kuasanya pun tidak dibatasi dengan tegas. Sistem pangan yang membuat segelintir masyarakat mampu bertahan malahan sistem pangan yang menggunakan sumber daya lokal, berbasis komunitas, dan berdaulat (*self-sufficient*) dari mekanisme pasar maupun kebijakan-kebijakan neoliberal tadi. Sebuah sistem pangan yang ironisnya terus digerus.

Food System Summit terasa jauh dan terlihat sebagai sebuah dinamika internasional, tetapi dampaknya akan tetap mengintai kita. Keluaran (outcome) Summit akan tetap masuk dalam kebijakan nasional. Upaya pelemahan institusi yang memerhatikan hak asasi manusia seperti CFS di tingkat global juga terjadi, memungkinkan peluang dialog nasional diadaptasi sebagai sebuah model forum yang baru dan dipakai di kemudian hari, sehingga akan semakin mempersempit ruang-ruang untuk mengklaim sistem pangan yang adil bagi kita.

---

<sup>1</sup> rekayasa biologis pada tanaman agar lebih banyak mengandung mikronutrisi.

<sup>2</sup> proses menambahkan mikronutrien pada produk pangan terproses misalnya biskuit bayi, mie instan, dan beras.



## Lampiran 1.

**IBCS (Indonesia Business Council for Sustainable Development)** Asosiasi yang dipimpin oleh CEO beranggotakan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, untuk “pembangunan berkelanjutan”, di mana anggotanya terdiri dari perusahaan-perusahaan agribisnis, industri ekstraktif, atau industri makanan/minuman yang problematis, seperti: Wilmar, Cargill, Monsanto, East West Indonesia Nestle, Freeport, dan masih banyak lagi. Berafiliasi dengan WBSCD.

**PISAgro** Berafiliasi dan didirikan karena keresahan dalam World Economic Forum (WEF) Summit. Anggotanya terdiri dari perusahaan-perusahaan yang didominasi oleh perusahaan transnasional seperti Bayer, Cargill, Dow AgroSciences, Syngenta, Koltiva, atau agribisnis lokal raksasa seperti Indofood, Great Giant Pineapple, Sinar Mas dll.

**World Business Council for Sustainable Development (WBCSD):** Asosiasi tingkat internasional yang anggotanya mencakup perusahaan transnasional seperti Bayer, Danone, Dow, Dupont, Kellogg's, Nestlé, PepsiCo, Rabobank;

**EAT Forum:** Didirikan oleh Stordalen Foundation, Stockholm resilience Center and the Wellcome Trust; Members of Board of Trustees: Potsdam Institut for Climate Impact Research, WEF, and others; Engagement Allies: WBCSD, Google Food Services, Nestlé, and others;

**Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN):** Partnerships with private sector: WBCSD, the US Council for International Business Foundation (USCIB), the International Food and Beverage Alliance (IFBA), the Consumer Goods Forum and others; Co-host of Scaling Up Nutrition (SUN) Business Network & Part of SUN executive committee; Partnership with AGRA; Member of Food Fortification Initiative (FFI); Participating in global policy networks such as the EAT Foundation, the Food and Land Use Coalition (FOLU), the WEF and Food System Dialogues (4SD). Solusinya banyak menyerukan fortifikasi dan biofortifikasi, padahal mengentaskan stunting dan malnutrisi bukan hanya perkara fortifikasi tetapi juga mengembalikan akses sumber daya produktif terhadap rumah tangga miskin atau memastikan sumber pendapatanya yang layak.